



## Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia

Khalib Gadafi<sup>1</sup>, Sasmi Nelwati<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Balai Gadang, Koto Tangah, Padang City, West Sumatra 25586

Email correspondence : [khalibgadafi100@gmail.com](mailto:khalibgadafi100@gmail.com)<sup>1</sup>, [sasminelwati@uinib.ac.id](mailto:sasminelwati@uinib.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract** This article examines the development of political dynasties in Indonesia and their impact on Pancasila democracy. The phenomenon of dynastic politics at the local level, which is increasingly prevalent in various regions of Indonesia, is the background of this discussion. The emergence of politics under this dynasty presents various positive and negative aspects, which reflect the dynamics of the political culture of Indonesian society in politics and democracy. Families maintain power by placing their members in strategic positions in the formal (government) and informal (business or project) sectors. The history of Indonesian governance shows the existence of political dynasties that last for years. If not addressed, these political dynasties can flourish, creating pros and cons amidst the implementation of Pancasila democratic governance. This research aims to explore the implementation of governance in Indonesia and understand how political dynasties affect the development of Pancasila democracy in the country.

**Keywords:** Pancasila, Democracy, Political Dynasty

**Abstrak** Artikel ini mengkaji perkembangan dinasti politik di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi Pancasila. Fenomena politik dinasti di tingkat lokal yang semakin marak di berbagai daerah Indonesia menjadi latar belakang pembahasan ini. Kemunculan politik di bawah dinasti ini menghadirkan berbagai aspek positif dan negatif, yang mencerminkan dinamika budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik dan berdemokrasi. Keluarga menjaga kekuasaan dengan menempatkan anggota mereka di posisi-posisi strategis di sektor formal (pemerintahan) dan informal (bisnis atau proyek). Sejarah pemerintahan Indonesia menunjukkan adanya dinasti politik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jika tidak diatasi, politik dinasti ini bisa berkembang pesat, menimbulkan pro dan kontra di tengah pelaksanaan pemerintahan demokrasi Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan memahami bagaimana dinasti politik memengaruhi perkembangan demokrasi Pancasila di negara tersebut.

**Kata Kunci :** Pancasila, Demokrasi, Dinasti Politik

### PENDAHULUAN

Keluarga dan kerabat dekat merupakan cara yang efektif untuk membentuk kekuasaan, seperti yang terlihat pada fenomena politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti ini telah menjadi bagian dari budaya politik di Indonesia dan menjamur di berbagai wilayah. Konsep ini mencakup strategi, perilaku, dan orientasi politik, yang pada akhirnya membentuk budaya politik masyarakat Indonesia (Ukhra et al., 2021).

Di Indonesia, dinasti politik merupakan proses regenerasi dan kontestasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui hubungan darah, perkawinan, atau kerabat dekat. Sejak zaman Orde Baru, dinasti politik sudah ada, dengan keluarga Cendana sebagai contoh nyata bahwa dinasti politik dapat mempengaruhi demokrasi Indonesia. Dinasti politik ini masih berlanjut selama masa reformasi. Saat ini, perhatian publik tertuju pada keluarga Presiden Joko Widodo, terutama anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan

menantunya, Bobby Nasution, yang memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal. Selain itu, pernikahan adiknya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi semakin memperkuat kekuatan politik keluarga Jokowi(Heriyanto, 2022).

Seperti kasus beberapa tahun lalu di pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten, dinasti politik yang dimulai oleh Chasan Sochib dan dilanjutkan oleh Ratu Atut Chosiyah memiliki pengaruh yang kuat. Keluarga besar Ratu Atut Chosiyah, termasuk suami, anak, menantu, adik, dan anggota keluarga lainnya, memegang jabatan eksekutif dan legislatif di DPD dan DPR. Selain itu, terdapat sekitar 57 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan pejabat lain di 15 provinsi, seperti Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku(Sutisna, 2017).

Menurut pandangan politik kontemporer, kemandulan demokrasi menyebabkan munculnya dinasti politik. Secara struktural, ini menyebabkan otonomi berlebihan yang menghasilkan kekuasaan etnis di daerah. Karena kurangnya pendidikan politik dan kaderisasi partai politik, dinasti ini berkembang sementara etika politik rendah. Persentase dinasti politik di Indonesia naik sebesar 14,78% pada tahun 2020, dengan 80 wilayah dari 541 wilayah yang terlibat setelah pilkada, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari "jurnal dinasti politik dalam pilkada di Indonesia" menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada yang melarang calon pemimpin daerah memiliki hubungan darah dengan petahana, karena dianggap politis dan asumtif(Gunanto, 2020).

Meskipun demokrasi tidak dapat menghalangi seseorang untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, kenyataan menunjukkan bahwa dinasti politik merusak demokrasi Indonesia. Contohnya adalah bagaimana Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya menggunakan politik uang untuk memenangkan anaknya, Iti Octavia Jayabaya, pada pilkada Lebak 2013, dan bagaimana Ratu Atut menggunakan politik uang untuk memenangkan ibu tirinya, Heryani, pada pilkada Banten 2010. Konsekuensi negatif lainnya adalah regenerasi pemerintahan yang berfokus pada satu atau beberapa keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas individu, sehingga kepentingan keluarga menjadi prioritas utama dan individu yang berkompeten tersingkir(Effendi, 2018).

Fatkhuri, seorang pemerhati politik dan alumni National University of Australia di Canberra, mengatakan bahwa politik dinasti memungkinkan segelintir orang yang memiliki hubungan kekerabatan untuk menguasai kepemimpinan, sehingga anggota keluarga dapat

dengan mudah mendapatkan jabatan publik dan menduduki posisi strategis dalam lembaga politik. Ini biasanya menunjukkan kekuasaan korup (Bimantara & Harsasto, 2018).

Menurut teori Lord Acton, "kekuasaan cenderung merusak, kekuasaan absolut merusak sepenuhnya," kekuasaan absolut adalah sumber korupsi. Jika merujuk kepada masa Orde Baru, disaat pemerintahan presiden Soeharto, meskipun tidak berkuasa secara politik, namun dinasti Soeharto telah menciptakan oligarki dengan menguasai akses ekonomi (Haliim & Hakim, 2020).

Maka banyak pandangan pro dan kontra terhadap politik dinasti. Namun, tidak semua politik dinasti didasarkan pada upaya memperkuat kekuasaan keluarga. Dalam beberapa situasi tertentu, politik dinasti bertujuan untuk mempertahankan posisi kepemimpinan tanpa mengenakan nama keluarga sebagai pemimpin. Budaya politik masyarakat terkait erat dengan persepsi pro dan kontra terhadap pembentukan dinasti politik, berkaitan dengan preferensi kekuasaan dalam hal penerimaan publik dan pembangunan rezim. Pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana demokrasi Pancasila, sebagai sistem pemerintahan Indonesia, dapat bertahan di tengah budaya politik dinasti yang terus berkembang?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sumber-sumber tersebut termasuk data primer seperti dokumen resmi, pidato, atau laporan kebijakan, serta data sekunder seperti artikel ilmiah, buku, atau studi kasus terkait (Akhyar et al., 2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana dinasti politik mempengaruhi pertumbuhan demokrasi Pancasila di Indonesia.

Metode penelitian deskriptif-analitik dipilih untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis temuan penelitian serta mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor yang terlibat dalam konteks dinasti politik dan demokrasi Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam peran dinasti politik dalam konteks demokrasi Pancasila, serta menemukan korelasi dan implikasi yang relevan. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka dan pendekatan deskriptif-analitik, peneliti dapat secara sistematis mengumpulkan data, menganalisis informasi yang relevan, dan menyusun temuan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan demokrasi di Indonesia terkait dengan fenomena dinasti politik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik dinasti merujuk pada penerusan kekuasaan politik di dalam lingkungan keluarga, mirip dengan model kerajaan di mana kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Yossi Nurmansyah, dinasti politik adalah sistem yang primitif karena mengandalkan hubungan darah dan keturunan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan dalam suatu negara (Susanti, 2017).

Menurut A.G.N. Ari Dwipayana dari Fisipol UGM, tren politik dinasti dapat dilihat sebagai bagian dari neopatrimonialisme. Ini berarti bahwa sistem ini berasal dari tradisi patrimonial, di mana regenerasi politik didasarkan pada ikatan keluarga daripada prestasi. Di era neopatrimonial seperti sekarang, meskipun tetap ada unsur patrimonial lama, pewarisan kekuasaan lebih sering terjadi melalui jalur politik yang diatur secara prosedural, seperti melalui partai politik (Prianto, 2016).

Namun, dampak dari politik dinasti dapat sangat merugikan. Misalnya, peningkatan praktik ini dalam pemilihan umum dan pilkada dapat mengakibatkan stagnasi dalam rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Selain itu, dominasi dinasti politik di tingkat lokal juga dapat menyebabkan korupsi sumber daya alam, kebocoran dana publik, dan penyalahgunaan anggaran.

Secara khusus, Zulkieflimansyah menyoroti beberapa dampak negatif dari politik dinasti, termasuk transformasi partai politik menjadi alat semata-mata untuk memperoleh kekuasaan. Ini mengakibatkan terbentuknya calon-calon instant dari kalangan selebriti atau pengusaha yang belum melewati proses kaderisasi yang layak. Akibatnya, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dengan cara yang benar dan transparan juga terbatas (Fitri, 2019).

Secara keseluruhan, politik dinasti mengancam proses demokrasi dengan menutup kesempatan bagi kader-kader yang berkompeten, serta dapat melemahkan mekanisme kontrol kekuasaan yang efektif, meningkatkan risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.

### **A. Teori Awal Terbentuknya Politik Dinasti**

Tujuan utama dari politik adalah memperoleh kekuasaan, sehingga perilaku politisi yang mendorong dinasti politik sering kali terfokus pada mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Alasan utama bagi politisi atau pejabat yang ingin meneruskan jabatan kepada anggota keluarga adalah untuk merasa lebih aman terhadap potensi penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan mereka selama masa jabatan, sering kali juga dengan tujuan untuk memperluas bisnis keluarga mereka. Politik dinasti sering kali dianggap sebagai

pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat dan beradab, dan juga sebagai pelanggaran terhadap semangat reformasi tahun 1998.

Selain itu, praktik politik dinasti sering dikaitkan dengan nepotisme, di mana politisi menggunakan posisi mereka untuk memberikan keuntungan kepada anggota keluarga mereka. Meskipun ada argumen bahwa pemimpin politik mungkin merencanakan suksesi dinasti sebagai strategi pertahanan untuk menghindari penuntutan korupsi di masa depan, penting untuk memahami bagaimana keluarga politik berinteraksi dengan politik informal yang lebih luas di tempat mereka berada (Darmansyah et al., 2020).

Dinamika ini dapat dipengaruhi oleh berbagai konfigurasi politik lokal; misalnya, elit lokal dapat fokus pada kompetisi internal yang intens, atau masyarakat sipil lokal dapat berkolaborasi untuk melawan korupsi oleh mereka yang berkuasa. Secara keseluruhan, politik dinasti bukan hanya mengancam integritas demokrasi, tetapi juga dapat menghalangi proses reformasi yang lebih luas dalam sistem politik suatu negara.

## **B. Menerapkan Teori Kritis Untuk Mengevaluasi Konsekuensi Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Dominasi Politik Dinasti**

Penggunaan teori kritis dalam menganalisis dampak buruk dari dinasti politik dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana dinasti politik mempengaruhi struktur dan fungsi demokrasi serta masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara teori kritis dapat digunakan untuk memeriksa dampak negatif dari dinasti politik:

1. **Kritik terhadap Struktur Kekuasaan:** Teori kritis menyoroti bagaimana dinasti politik menciptakan dan memperpetuasi struktur kekuasaan yang tidak merata di mana kekuasaan dan sumber daya terpusat dalam kelompok yang sama. Hal ini bisa menghambat rotasi kekuasaan yang sehat dan membatasi kesempatan partisipasi politik dari individu-individu di luar keluarga politik.
2. **Penjelasan atas Dominasi Politik:** Teori kritis mempertanyakan bagaimana dinasti politik dapat mendominasi institusi-institusi politik dan ekonomi, seperti partai politik atau lembaga pemerintahan. Hal ini dapat menghasilkan oligarki politik di mana kepentingan kelompok kecil mengalahkan kepentingan umum.
3. **Analisis terhadap Ideologi dan Hegemoni:** Teori kritis melihat bagaimana dinasti politik membangun dan memperkuat hegemoni ideologis, di mana keabsahan dan keberlanjutan dinasti dipertahankan melalui narasi-narasi ideologis yang menguntungkan kelompok elit tertentu. Ini bisa menciptakan kesenjangan antara retorika publik dan realitas politik sehari-hari.

4. Kritik terhadap Legitimasi Politik: Teori kritis mempertanyakan bagaimana dinasti politik mempertahankan legitimasi mereka di mata publik. Apakah legitimasi ini didasarkan pada kinerja dan pelayanan publik yang baik, ataukah lebih didasarkan pada kontrol politik dan kekuasaan ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun.
5. Perspektif Keadilan Sosial: Teori kritis menyoroti ketidakadilan sosial yang mungkin dihasilkan oleh dinasti politik, di mana akses terhadap kekuasaan dan sumber daya terpusat dalam kelompok elit tertentu, sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses politik (Djati, 2014).

Dengan pendekatan teori kritis ini, analisis terhadap dinasti politik bisa lebih komprehensif dan mengungkapkan dampak buruk yang mungkin terabaikan dari praktik politik ini terhadap struktur demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan politik yang inklusif.

Uraian di atas memberikan pemahaman tentang mengapa beberapa politisi memanfaatkan dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Menurut Ari Dwipayana, seorang profesor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, fungsi partai telah diubah menjadi semata-mata alat politik karena dinasti politik. Hal ini menyebabkan partai tidak dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu mengutamakan orang-orang yang berkualitas untuk membantu negara dan masyarakat. Sebaliknya, perhatian lebih besar diberikan kepada mereka yang telah dipilih oleh partai untuk menjaga kekuasaan mereka dalam pemilu berikutnya, seperti dengan melibatkan anggota keluarga seperti anak wali kota (Fitriyah, 2020).

Selain itu, konsekuensi lain dari dinasti politik adalah kurangnya kontrol kekuasaan. Hal ini memungkinkan penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti yang disebutkan di bawah ini. Secara tidak langsung, dinasti politik memengaruhi kualitas demokrasi dengan meningkatkan kemungkinan korupsi, kolusi yang tidak etis, dan nepotisme yang mengutamakan kerabat daripada kemampuan pemimpin (Hidayati, 2014).

Dengan kata lain, penggunaan dinasti politik dapat menyebabkan pelanggaran demokrasi dan pemerintahan yang efektif, serta mengorbankan kepentingan publik untuk kepentingan kelompok politik tertentu.

### **C. Penerapan Teori Dekonstruksi Terhadap Tulisan "Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik"**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wimmy Haliim dan Andy Ilman Hakim tentang kepuasan publik di bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan di Kediri, respons masyarakat terhadap pelayanan dari dinasti politik keluarga Sutrisno, pemimpin daerah

Kediri, rata-rata menunjukkan kepuasan. Berbagai indikator seperti pembukaan banyak puskesmas, peningkatan ekonomi yang signifikan, dan pemberian beasiswa di beberapa sekolah menjadi faktor yang disoroti sebagai bukti keberhasilan (Bimantara & Harsasto, 2018).

Namun demikian, dengan menggunakan teori dekonstruksi, kita dapat melihat bahwa meskipun dinasti politik terlihat menguntungkan secara angka bagi masyarakat, ini sebenarnya dapat menimbulkan masalah serius. Salah satunya adalah potensi terjadinya nepotisme, di mana kerabat atau anggota keluarga yang tidak memiliki kualifikasi memadai dapat menduduki posisi penting, seperti contoh bila salah satu kerabat terpilih menjadi ketua DPR-D di Kediri (Sembiring & Simanihuruk, 2018).

Selain itu, dinasti politik juga berpotensi memunculkan kolusi, yaitu praktik melanggar hukum dengan bekerja sama, karena semua orang yang menduduki kekuasaan berasal dari satu keluarga dan cenderung saling melindungi. Bayangkan jika ada kasus korupsi atau penyimpangan lainnya, keluarga yang terlibat dalam dinasti tersebut mungkin tidak akan mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Politik dinasti menarik karena seringkali menghasilkan data yang menunjukkan pencapaian positif. Namun, hal ini tidak berarti kita tidak boleh bersikap kritis terhadap fenomena tersebut. Di Indonesia, konsep demokrasi dan kepentingan umum harus tetap menjadi landasan politik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Politik dinasti menyalahi prinsip ini karena fokusnya pada kepentingan pribadi dan reproduksi kekuasaan di dalam keluarga tertentu, bukan pada kemaslahatan umum (Hidayati, 2014).

Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah sebuah republik yang didirikan atas prinsip kesetaraan dan keadilan. Politik dinasti bertentangan dengan prinsip ini karena menurunkan kekuasaan secara biologis dalam keluarga-keluarga tertentu, bukan melalui mekanisme demokratis yang partisipatif. Oleh karena itu, untuk mempertahankan warisan republik yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa, kita harus menolak politik dinasti sebagai bentuk yang menyerang nilai-nilai dasar republik itu sendiri.

#### **D. Demokrasi Pancasila Sebagai Identitas Bangsa**

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pada intinya, Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ini berusaha untuk mengharmoniskan hubungan antara berbagai komponen masyarakat dengan tetap menghormati nilai-nilai kebersamaan dan musyawarah (Hutabarat et al., 2021).

Prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, demokrasi ini menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlakuan yang adil serta beradab kepada setiap individu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dijaga dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu.

Proses pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, bukan sekadar berdasarkan suara mayoritas. Dalam musyawarah, diutamakan pencapaian kesepakatan yang adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Hal ini mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Gandamana, 2017).

Salah satu ciri khas Demokrasi Pancasila adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kebebasan individu diakui dan dilindungi, tetapi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Demokrasi ini juga berupaya menciptakan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dengan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dalam pelaksanaannya, Demokrasi Pancasila diwujudkan melalui mekanisme seperti pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat serta pemimpin eksekutif secara demokratis. Lembaga perwakilan seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berfungsi menjalankan legislasi, pengawasan, dan anggaran. Proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demokrasi Pancasila juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, implementasi Demokrasi Pancasila menghadapi beberapa tantangan, seperti kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi dan nepotisme, rendahnya partisipasi publik dalam proses politik dan pemerintahan, serta tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah



keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Secara keseluruhan, Demokrasi Pancasila adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial (Yunus, 2015).

Demokrasi pancasila mengedepankan kedaulatan di tangan rakyat, namun dijalankan secara gotong royong dan musyawarah mufakat. Hak dan kewajiban seimbang, ditegakkan melalui hukum yang adil. Berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu, demokrasi Pancasila mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Musyawarah mufakat menjadi kunci pengambilan keputusan, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, tetapi juga cara hidup. Nilai-nilainya tertanam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diwujudkan melalui berbagai aspek, seperti pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum. Tantangan pasti ada, seperti politik uang, hoaks, dan apatisme politik (Gandamana, 2017). Namun, dengan semangat demokrasi Pancasila, kita jaga persatuan, kuatkan partisipasi, dan ciptakan bangsa yang adil, sejahtera, dan makmur. Demokrasi Pancasila ini bukan sekadar teori, tetapi pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **E. Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Demokrasi Pancasila**

Pengaruh dinasti politik terhadap demokrasi Pancasila dapat menjadi kompleks dan sering kali kontroversial. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup lima prinsip utama, di antaranya adalah kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Namun, dinasti politik, di mana kekuasaan atau posisi politik diturunkan dalam satu keluarga atau lingkaran kekuasaan tertentu, dapat menimbulkan dampak-dampak berikut terhadap demokrasi Pancasila:

1. Kedaulatan Rakyat yang Tercabik-cabik : Prinsip kedaulatan rakyat dalam Pancasila menekankan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Namun, dalam dinasti politik, terjadi konsentrasi kekuasaan dalam keluarga-keluarga tertentu, yang dapat mengurangi kesempatan rakyat untuk secara bebas memilih pemimpin yang mereka yakini mampu mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat merusak prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan partisipasi rakyat secara adil dan bebas.
2. Keadilan Sosial yang Terganggu : Pancasila juga menegaskan pentingnya keadilan sosial, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk

mendapatkan manfaat dari pembangunan dan pemerataan. Dinasti politik cenderung mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu, yang dapat memunculkan praktik-praktik tidak adil seperti nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

3. Integritas dan Akuntabilitas Pemerintahan : Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila mencakup integritas pemerintahan dan akuntabilitas terhadap rakyat. Dinasti politik sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan integritas dan akuntabilitas ini, karena ada risiko konflik kepentingan dan pengabaian terhadap tuntutan transparansi dalam pengambilan keputusan.
4. Pembatasan Persaingan Politik yang Sehat : Demokrasi Pancasila mengharapkan persaingan politik yang sehat dan berimbang, di mana ide-ide dan program-program yang beragam dapat dipertimbangkan untuk kesejahteraan bersama. Dinasti politik dapat menghambat proses ini dengan mempersempit ruang bagi kandidat-kandidat dari luar lingkaran dinasti untuk bersaing secara adil, sehingga membatasi pilihan politik yang tersedia bagi rakyat(Hidayati, 2014).

Secara keseluruhan, pengaruh dinasti politik terhadap demokrasi Pancasila cenderung mereduksi esensi dari prinsip-prinsip demokratis yang dipegang teguh oleh Pancasila. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi sejati, yang menghormati kedaulatan rakyat, keadilan sosial, integritas pemerintahan, dan persaingan politik yang sehat untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam kerangka negara berdasarkan Pancasila.

Pemilu Indonesia, yang diadakan setiap lima tahun sekali, merupakan momen penting dalam persaingan politik di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dalam posisi legislatif maupun eksekutif. Harapan utama adalah bahwa para wakil yang terpilih akan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dengan demokrasi di negara lain, karena mencakup bagaimana pemerintah beroperasi dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakatnya(Sembiring & Simanihuruk, 2018).

Ini menggambarkan bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah diatur dalam kerangka negara. Warga negara memiliki kebebasan yang dijamin, namun ada konstitusi atau hukum yang mengatur hak dan kebebasan individu untuk memastikan bahwa kebebasan satu orang tidak merugikan kebebasan orang lain. Pemilu lima tahunan di

Indonesia adalah wujud dari hak asasi setiap warga negara untuk secara bebas menentukan pilihan politik mereka. Hal ini menjadi fondasi penting dalam proses demokrasi karena memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah negara mereka, serta menegakkan dasar untuk pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

#### **F. Praktek Politik Dinasti**

Politik Dinasti dapat diartikan sebagai pisau bermata dua. Artinya, di satu sisi, praktik politik dinasti merampas hak orang lain karena berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pada sisi lain, pelarangan terhadap seseorang yang mempunyai hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah bagian dari dinasti politik itu sendiri dan juga melanggar hak politik seseorang sehingga bertentangan dengan asas demokrasi. Maka, dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pelarangan dimaksud bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti dihalalkan melalui putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015. Larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Tak jauh-jauh yang bisa kita pelajari dari suksesi kepemimpinan dalam sebuah pemilihan kepala desa yang lumrah diwarnai dengan politik dinasti. Walau tetap dengan pemilihan langsung, calon yang ikut kompetisi berasal dari dinastinya, seperti istri, anak atau kerabatnya (Gunanto, 2020).

Pada konteks pro dan kontra politik dinasti, pemaknaan demokrasi menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan, yaitu politik dinasti dinilai tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi di sisi lain hal itu kerap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi. Muncul Pertanyaannya, apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Menggerus demokrasi? Seperti ungkapan di atas, politik dinasti sudah menggejala sejak lama. Hal ini akan semakin jelas pada era kerajaan yang memang kekuasaan turun temurun (Haliim & Hakim, 2020).

Fenomena pemilihan kepala desa secara langsung, politik dinasti juga menjadi hal yang lumrah. Walau dipilih secara langsung, peranan ke-dinasti-an tetap berjalan, walaupun dengan proses demokrasi. Memasuki era reformasi sedikit merubah memperoleh kekuasaan dengan demokrasi dalam bentuk pemilihan langsung. Namun tidak menghilangkan praktik politik dinasti itu sendiri. Menjawab pertanyaan apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya mengebiri demokrasi karena praktik-praktik politik dinasti cenderung memengaruhi proses yang mestinya demokratis, menjadi tidak demokratis karena campur tangan pihak-pihak yang memiliki

kekuasaan, kekuatan, pengaruh, finansial dan infrastruktur politik yang kuat. Artinya, “bungkusnya demokrasi tetapi isinya tidak demokratis”.

Pada zaman kerajaan, menentukan pemimpin berdasarkan pewarisan serta ditunjuk secara langsung. Dewasa ini mencari kepala daerah lewat jalur politik prosedural. Dimana keluarga para elite kekuasaan lewat institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Artinya, “Patrimonialistik dibungkus dengan Prosedural”. Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang berproses di Indonesia dan akan melemahkan demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena politik dinasti, cenderung mengabaikan kompetensi, rekam jejak, kaderisasi dan kepatutan. Benar, Salah Politik Dinasti. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan warganya. Demokrasi memungkinkan warga negara berpartisipasi, bisa langsung atau lewat perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kesetaraan dalam demokrasi mencakup kondisi politik, ekonomi sosial, dan budaya (Darmansyah et al., 2020).

Namun pada sisi yang lain, politik dinasti bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara yang demokratis. Politik dinasti lebih tepat di negara dengan sistem pemerintahan monarki, dimana untuk memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan dan syarat akan praktik nepotisme kebijakan. Politik dinasti dianggap salah, karena berpotensi kuat menyuburkan budaya nepotisme. Betapa tidak, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh hanya sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dengan demikian secara politik, ada kecenderungan mempertahankan kekuasaan dengan cara menyuburkan politik dinasti dengan tujuan agar kekuasaannya terpelihara dan kebobrokkannya terus terjaga. Artinya, “menjaga agar kekuasaan tidak direbut oleh lawan politiknya atau kelompok yang berseberangan”. Sisi lain, dengan terbukanya politik dinasti, maka peluang orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan semakin subur dan terbuka. Sebaliknya, ada orang yang lebih kompeten, lebih memiliki kapasitas bisa tergusur dan tidak dipakai karena alasan subjektif.

Secara Yuridis Formal tidak ada regulasi yang melarang seseorang untuk menggunakan hak politiknya dikaitkan dengan keluarga atau dinasti. Secara Filosofi, harapannya kehidupan demokrasi ke depan mestinya akan jauh lebih baik dan terasa lebih adil. Secara Sosiologis, masih ada masyarakat yang belum menerima praktek politik dinasti itu sendiri. Bagaimana cara mencegah politik dinasti terus berkembang ? Salah satunya yaitu melalui pola rekrutmen partai politik. Hal ini dikarenakan tumbuh suburnya dinasti politik tidak

terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Praktik ini akan menegasikan hak setiap orang dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia(Heriyanto, 2022).

Praktik dinasti politik ini mengindikasikan bahwa terdapat problem dalam proses rekrutmen politik. Filter utama untuk menjangking calon-calon dan kaderkader berkualitas yang akan diikutsertakan dalam kontestasi politik ialah menjadi tugas utama partai politik. Kajian terhadap proses rekrutmen politik menjadi penting karena jika rekrutmen tidak baik, maka juga akan berdampak tidak baik juga terhadap partai politik yang justru akan melahirkan praktik dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik

Terkait hal ini terdapat beberapa pilihan bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen politik, yaitu: (i) model partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis, (ii) model compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM, (iii) model immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut, serta (iv) model civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan seorang calon di masyarakat(Prianto, 2016).

#### **G. Proses Rekrutmen Politisi Kedalam Partai Politik**

Dalam konteks rekrutmen politik tersebut, partai politik dapat melakukan proses rekrutmen melalui proses rekrutmen terbuka atau juga melalui proses rekrutmen tertutup. Jika menggunakan rekrutmen terbuka, maka syaratnya harus menampilkan seseorang tokoh yang dapat diketahui kinerjanya secara luas oleh publik. Dalam hal ini partai politik harus menyetujui calon yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya.

Hal ini sejalan praktik negara demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses rekrutmen terbuka dapat dikatakan sebagai mekanisme rekrutmen yang

demokratis, karena menampung aspirasi publik. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka ini adalah terciptanya mekanisme yang demokratis, tingginya tingkat akuntabilitas karena rekam jejaknya dapat dinilai, terciptanya kompetisi politik yang adil atau fair, serta diharapkan dapat melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi (Fitriyah, 2020).

Adapun praktik rekrutmen tertutup merupakan praktik rekrutmen yang berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam hal ini syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.

Dengan demikian cara ini kurang kompetitif karena menutup akses publik. Hal ini menyebabkan demokrasi hanya berfungsi sebagai sarana bagi elit untuk memperbaharui legitimasinya. Mekanisme rekrutmen tertutup ini juga dapat berkontribusi dalam pembentukan dinasti politik. Pada prinsipnya, setiap partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen. Artinya setiap partai politik diberikan kebebasan untuk itu dan proses yang dipilihnya akan menentukan karakteristik partai politik itu sendiri (Haliim & Hakim, 2020).

Jika ditinjau dari beberapa pilihan proses rekrutmen di atas, idealnya partai politik seharusnya dapat mengedepankan proses rekrutmen model civil service reform atau model compartmentalization dengan proses rekrutmen yang terbuka. Partai politik harus mendasari pemilihan calon pemimpin tersebut berdasarkan kapabilitas dan kemampuannya untuk diterima oleh publik. Selain kapabilitas yang mumpuni, prosesnya juga harus dilakukan secara terbuka guna menghindari kepentingan-kepentingan yang cenderung politis.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan yang telah kita bahas untuk menjelaskan suatu fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena kecenderungan keluarga untuk mempertahankan kekuasaan, memungkinkan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi lebih mudah dilakukan dan sulit untuk dicegah. Regenerasi kepemimpinan yang terbatas pada beberapa keluarga juga mengganggu fungsi partai politik dengan mengabaikan individu yang berpotensi.

Secara hukum politik, dinasti tidak dilarang secara eksplisit, namun yang perlu dikritisi adalah ketika dinasti politik disalahgunakan untuk memperoleh kekuasaan, yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Politik dinasti sebenarnya lebih sesuai untuk sistem monarki, di mana kepemimpinan ditentukan oleh garis keturunan, namun tidak cocok diterapkan dalam sistem demokratis. Praktik ini sering kali dianggap keliru karena memperkuat budaya nepotisme.

Namun demikian, mengingat bahwa rekrutmen politik dapat menjadi pintu masuk bagi praktik dinasti politik, partai-partai politik seharusnya mengutamakan pemilihan calon berdasarkan kapabilitas dan penerimaan publik yang baik. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah mengulas tentang dinasti politik, jarang yang membahas proses rekrutmen politik oleh partai politik dan alasan di balik nominasi calon dari keluarga tertentu. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam tentang hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38.
- Bimantara, N., & Harsasto, P. (2018). Analisis politik dinasti di kabupaten kediri. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 201–210.
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34–46.
- Djati, W. R. (2014). Revivalisme kekuatan familisme dalam Demokrasi: dinasti politik di aras lokal. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 18(2), 72–100.
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91–111.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
- Gandamana, A. (2017). Memaknai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed*, 7(1).
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191.
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2020). Dinasti Politik: Basis Politik dan Kepuasan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 258–273.

- Heriyanto, H. (2022). Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 29–46.
- Hidayati, N. (2014). Dinasti politik dan demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 10(1).
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, 1(1), 59–64.
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 92–98.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119.
- Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100–120.
- Ukhra, A., Hijri, Y. S., & Taufikurrohman, I. (2021). Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 350–361.
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio Didaktika: Social Science Education Jurnal*, 2(2).